

Katalog: 9201024.33

# ANALISIS INDEKS WILLIAMSON PROVINSI JAWA TENGAH 2019-2023

<https://jateng.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH



Katalog: 9201024.33

# **ANALISIS INDEKS WILLIAMSON PROVINSI JAWA TENGAH 2019-2023**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**



# **ANALISIS INDEKS WILLIAMSON**

## **PROVINSI JAWA TENGAH 2019–2023**

No. ISBN : 978-623-6294-10-9

No. Publikasi : 33000.24063

Katalog : 9201024.33

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : x + 62 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



# **ANALISIS INDEKS WILLIAMSON**

## **PROVINSI JAWA TENGAH 2019–2023**

### **Anggota Tim Penyusun :**

Pengarah : Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM

Penanggung Jawab : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

Penyunting : Didik Nursetyohadi, M.Agb.  
Irma Nur Afifah, SST., M.Si

Penulis : Asy-Syifa Hanum Farida, SST

Pengolah Data : Asy-Syifa Hanum Farida, SST

Desain dan Layout : Joko Mulyono

Penyusun : Asy-Syifa Hanum Farida, SST





# KATA PENGANTAR

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah.

Penyusunan publikasi Analisis Indeks Williamson 2019–2023 bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi kesenjangan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah..

Publikasi ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan dan memberikan informasi berharga bagi para pengguna data BPS, baik dari kalangan pemerintah maupun publik.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Semarang, September 2024  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Tengah



**Endang Tri Wahyuningsih**



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>INFOGRAFIS</b> .....	1
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	3
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Tujuan dan Manfaat .....	8
1.3. Ruang Lingkup .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN</b> .....	11
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	11
2.2. Gini Rasio .....	12
2.3. Kriteria Bank Dunia .....	13
2.4. Ukuran Ketimpangan Antar Wilayah .....	14
<b>BAB III. POTENSI SOSIAL EKONOMI JAWA TENGAH</b> .....	17
3.1. Geografis Dan Demografi Jawa Tengah .....	17
3.2. Posisi Ekonomi Jawa Tengah Indonesia .....	20
<b>BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN JAWA TENGAH</b> .....	29
4.1. Ketimpangan Pendapatan .....	29
4.2. Ketimpangan Wilayah .....	35
4.3. Analisis Indeks Williamson .....	40
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	45
5.1. Kesimpulan .....	45
5.2. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	49
<b>LAMPIRAN</b> .....	51

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, 2019–2023 .....	41
Tabel 1. PDRB Per Kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2019–2023 .....	53
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi di Indonesia, 2019–2023	55
Tabel 3. Gini Rasio menurut Provinsi di Indonesia, 2019–2023 (Maret) .....	57
Tabel 4. Jumlah Penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010, 2020, dan 2023 .....	59

## DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1. Kontribusi Ekonomi Lima Terbesar Provinsi di Indonesia 2019–2023.....	21
Grafik 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia 2020.....	23
Grafik 3.3. PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Indonesia 2023.....	25
Grafik 3.4. Gini Rasio Menurut Provinsi di Indonesia 2023.....	27
Grafik 4.1. Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah dan Indonesia, Maret 2019 – Maret 2023 .....	31
Grafik 4.2. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah di Jawa Tengah, 2019–2023 .....	32
Grafik 4.3. Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023.....	34
Grafik 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Tengah (Juta Rupiah) 2019-2023 .....	36
Grafik 4.5. PDRB Per Kapita Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) 2023.....	37
Grafik 4.6. Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, 2019–2023 .....	43

<https://jateng.bps.go.id>

# ANALISIS KETIMPANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2019-2023

## ANALISIS KETIMPANGAN



## GINI RATIO

Selama periode 2019-2023 gini rasio untuk Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Indonesia. Posisi gini rasio Jawa Tengah berada pada kategori ketimpangan rendah, walaupun dalam perjalanannya menunjukkan pola yang berfluktuasi.



## INDEKS WILLIAMSON

Disparitas Indeks Williamson non migas semakin mengecil dari 2020 - 2023 menandakan penciptaan ekonomi riil di Jawa Tengah semakin meningkat. Permasalahan yang masih menjadi PR adalah menekan ketimpangan pembangunan. Sehingga pembangunan riil ini lebih bisa dinikmati oleh semua wilayah di Jawa Tengah.







Sebuah dilema selama proses awal pembangunan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan yang merata. Salah satu diantara problematika kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah masih adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah.

Hal ini menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Tingkat perbedaan pendataan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM) juga disebabkan faktor eksternal yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Salah satu diantara indikator untuk mengetahui ketimpangan pembangunan adalah Indeks Williamson, dimana di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 angka ini berkisar pada nilai 0,643. Angka indeks ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tinggi.

Penciptaan ekonomi riil ini seyogyanya diprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju pesat dengan melakukan *sharing skill* dari daerah yang maju ke daerah tertinggal. Selain itu perlu membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang.

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, maka tingkat kesejahteraannya juga semakin baik.

Menurut Lincolin Arsyad (1999), tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain, bahwa apa yang disebut dengan “*trickle down effect*” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas.

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, fenomena

ini menjadi masalah yang telah lama terjadi dan harus dihadapi. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi.

Ketimpangan dapat terjadi karena salah satu faktor seperti prioritas pembangunan lebih aktif di wilayah perkotaan sedangkan wilayah pedesaan jarang tersentuh. Dengan adanya perbedaan pembangunan dan infrastruktur juga berdampak terhadap perbedaan pendapatan masyarakat baik yang ada di kota maupun di daerah. Ini menjadi salah satu masalah kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah yaitu ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi harus dapat menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja yang makin terbuka bagi penduduk dan masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan harus sinkron sehingga angkatan kerja bisa terserap dengan baik. Hal ini memerlukan kebijakan pembangunan yang komprehensif, menyeluruh dan bisa memenuhi kebutuhan wilayahnya. Namun kenyataannya terkadang hasil pembangunan pada masing-masing wilayah menciptakan ketimpangan antar daerah.

Tanpa adanya koordinasi, setiap daerah tidak akan mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pembangunan wilayahnya. Kemampuan pembangunan wilayah ini dan sumber daya alam yang berbeda-beda antar wilayah akan menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan regional merupakan

ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya. Walaupun pada dasarnya kesenjangan pembangunan adalah *inherent* dengan proses pembangunan itu sendiri (Ardani, 1992). Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis *development gap* antar wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), *Human Development Index* (HDI), konsumsi rumah tangga per kapita, kontribusi sektoral PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan wilayah.

Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Karena investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia. Sedangkan daerah yang tidak memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal, demikian akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, sehingga akan berdampak terhadap tingkat pendapatan daerah.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan. Jawa Tengah mempunyai kontribusi ekonomi terbesar keempat dari ekonomi nasional sebesar 8,15%. Dalam periode 2015-2019 pembangunan Jawa Tengah terus tumbuh melampaui pertumbuhan nasional. Karakteristik ekonomi Jawa Tengah yang berpotensi menumbuhkan perekonomian nasional dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di Indonesia dan mempunyai keamanan yang kondusif merupakan pasar potensial yang selalu dilirik investor. Tahun 2023, ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh hingga sebesar 4,98% setelah melewati Pandemi Covid-19.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

## **1.2. TUJUAN DAN MANFAAT**

### **Tujuan :**

- 1) Menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi
- 2) Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan

## **Manfaat :**

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah
- 2) Memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama

### **1.3. RUANG LINGKUP**

Wilayah cakupan dalam penyusunan Indeks Williamson ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Indeks Williamson yang akan disusun meliputi Indeks Williamson migas dan tanpa migas.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Bab I Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang adanya ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah, rumusan masalah tentang ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan

#### **Bab II Metode Penghitungan**

Pada bab ini dipaparkan tentang definisi operasional, populasi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tentang ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.



### **Bab III Profil Ekonomi Jawa Tengah**

Menggambarkan keadaan demografi kabupaten/kota di Jawa Tengah, perekonomian antar kabupaten/kota dan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi ketimpangan pendapatan, analisis tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan pembahasan tentang tingkat ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Bab V Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penghitungan serta memberikan beberapa saran terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

## BAB II. KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN

### 2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Menurut Sukirno (2004), untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional yang semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain pertumbuhan, baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibandingkan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya. PDRB riil dicerminkan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.

Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_t = \frac{\text{PDRBriil}_t - \text{PDRBriil}_{t-1}}{\text{PDRBriil}_{t-1}}$$

Keterangan :

$Y_t$  = Pertumbuhan ekonomi tahun t

PDRB riil = Produk Domestik Regional Bruto riil

t = Periode tahun

## 2.2. Gini Rasio

Indeks Gini, Rasio Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesia Development, 2018*). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai Rasio Gini atau Indeks Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

Keterangan :

GR = Koefisien Gini

F<sub>pi</sub> = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F<sub>ci</sub> = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini (Susanti et al 2007) adalah sebagai berikut :

- a. Gini rasio  $< 0,4$  : tingkat ketimpangan rendah
- b.  $0,4 < \text{gini rasio} < 0,5$  : tingkat ketimpangan sedang
- c. Gini rasio  $> 0,5$  : tingkat ketimpangan tinggi

### 2.3. Kriteria Bank Dunia

Cara lain yang juga seringkali diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yaitu :

- a. 40% penduduk dengan pendapatan rendah
- b. 40% penduduk dengan pendapatan menengah
- c. 20% penduduk dengan pendapatan tinggi

Kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut :

- a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12%-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang atau menengah.

- c. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

#### 2.4. Ukuran Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Indeks Williamson merupakan hubungan antara disparitas regional dengan tingkat ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah pendapatan regional per kapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Formulasi Indeks Williamson secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{n_i}{n}}}{\bar{y}}$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

$Y_i$  = PDRB Per kapita tiap Kabupaten/kota

$\bar{y}$  = PDRB Per kapita Provinsi

$n_i$  = Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/kota

$n$  = Jumlah Penduduk Provinsi

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson : Jika nilai IW menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar, dan jika nilai IW mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil.

<https://jateng.bps.go.id>

## **BAB III. POTENSI SOSIAL EKONOMI JAWA TENGAH**

Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki posisi strategis, baik dari aspek ekonomi maupun dari sisi demografinya. Secara ekonomi provinsi ini menghubungkan dua kota besar Jakarta dan Surabaya. Penghubung dari kawasan timur dan barat Indonesia atau sebaliknya. Infrastruktur yang menunjang perekonomian Jawa Tengah sebagai *entry poin* antara lain pelabuhan Tanjung Mas, Bandara Ahmad Yani, Bandara Adi Sumarmo yang merupakan sarana dan prasarana lalu lintas perdagangan barang dan jasa serta lalu lintas penumpang baik dalam maupun luar negeri. Adanya infrastruktur tersebut mampu mendorong berbagai sektor antara lain sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor pertanian, serta jasa hiburan dan rekreasi di Jawa Tengah yang terus berkembang. Beberapa faktor ini dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dengan rata-rata diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi alam dan lingkungan mempengaruhi budaya dan karakteristik penduduk Jawa Tengah.

### **3.1. Geografis dan Demografi Jawa Tengah**

#### **3.1.1. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah**

Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah pulau Jawa. Posisi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang cukup strategis untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi, baik di sektor pertanian, industri, maupun perdagangan. Secara geografis, Jawa Tengah dikelilingi oleh 3 (tiga) provinsi dan 2 (dua) lautan. Di sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah



dibatasi oleh Laut Jawa, sedangkan di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Sementara di sebelah barat, Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan di bagian selatan, Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah terletak pada  $5^{\circ}40' - 8^{\circ}30'$  LS dan  $108^{\circ}30' - 111^{\circ}30'$  BT. Posisi astronomis ini menyebabkan Jawa Tengah memiliki curah hujan dan kelembaban yang cukup tinggi. Secara umum, rata-rata suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara  $26,70^{\circ}\text{C} - 30,40^{\circ}\text{C}$  pada tahun 2023, dengan kelembaban berkisar antara 67-87 persen. Sementara itu, rata-rata banyaknya curah hujan berkisar antara 1.333-2.799 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan berkisar 80-161 hari pertahun.

Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang cocok untuk budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Selain karena memiliki curah hujan yang cukup, Jawa Tengah juga memiliki lahan subur yang terbentang di berbagai lereng gunung yang ada di Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2019, Jawa Tengah memiliki luas lahan sawah sebesar 1,05 juta hektar atau sekitar 14,06 persen dari luas total lahan sawah di Indonesia. Selain menjadi provinsi dengan luas lahan sawah terbesar kedua setelah Jawa Timur, Jawa Tengah juga menjadi wilayah pemasok tanaman hasil pertanian yang utama bagi Indonesia, terutama padi dan palawija.

Secara administratif, luas Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar  $34.337,48 \text{ km}^2$  atau sekitar seperempat luas wilayah Pulau Jawa (BPS Jawa Tengah, 2024). Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap, yaitu sebesar  $2.323,93 \text{ km}^2$ , sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Magelang, yaitu seluas  $18,56 \text{ km}^2$ .

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2021, jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami pemekaran. Dari hasil Podes 2021 terlihat bahwa Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 6 Kota dan 29 Kabupaten, dengan jumlah kecamatan sebanyak 576 kecamatan. Selain itu, hasil Podes 2021 juga memperlihatkan bahwa jumlah wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa tercatat sebanyak 7.809 desa dan 753 kelurahan. Dari total 7.809 desa tersebut, sebanyak 6.632 desa (84,93 persen) terkategori sebagai desa berkembang dan sebanyak 1.133 desa (14,51 persen) terkategori sebagai desa mandiri. Sisanya, sebanyak 44 desa (0,56 persen) masih terkategori sebagai desa tertinggal (BPS, 2018). Kategorisasi ini didasarkan pada Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dihitung oleh BPS. IPD menunjukkan tingkat perkembangan desa yang disusun berdasarkan 5 dimensi, yaitu; Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Transportasi, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Seperti halnya wilayah lainnya yang berada pada jalur cincin api dunia (*ring of fire*), Jawa Tengah memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Dari sebelas gunung besar yang ada di Jawa Tengah, enam diantaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Slamet, Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, dan Gunung Ungaran. Keberadaan gunung aktif ini menjadikan daerah di sekitar lereng gunung menjadi wilayah yang cukup subur untuk budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Di lereng gunung Sumbing-Sindoro-Slamet misalnya, terbentang lahan pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan. Pun demikian di lereng gunung Merapi, yang juga menghasilkan mineral alam berupa batu pasir yang sangat berkualitas. Bahkan, wilayah lereng gunung Merapi menjadi salah satu pemasok batu pasir yang utama di Jawa Tengah.

### 3.1.2. Demografi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebanyak 32.443.899 orang. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.742.501 orang. Jumlah ini bertambah sekitar 4 juta orang apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Di tahun 2023, jumlah penduduk Jawa Tengah menjadi 37.540.962 orang. Kabupaten Brebes memiliki penduduk sebanyak 1,99 juta (5,42%) menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Kota Magelang dengan penduduk sebanyak 121,61 ribu (0,33%) menjadi kota dengan jumlah penduduk paling sedikit di Jawa Tengah.

Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 21,07 juta atau 71,72% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas (sakernas, Agustus 2023). Sisanya adalah penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Dari total penduduk angkatan kerja, sebanyak 94,87% mempunyai status bekerja. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah bekerja pada sektor pertanian sebesar 24,43% (Sakernas, Agustus 2023). Selain pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan juga mewarnai sumber ekonomi penduduk Jawa Tengah dengan besaran masing-masing 20,94% dan 18,32%.

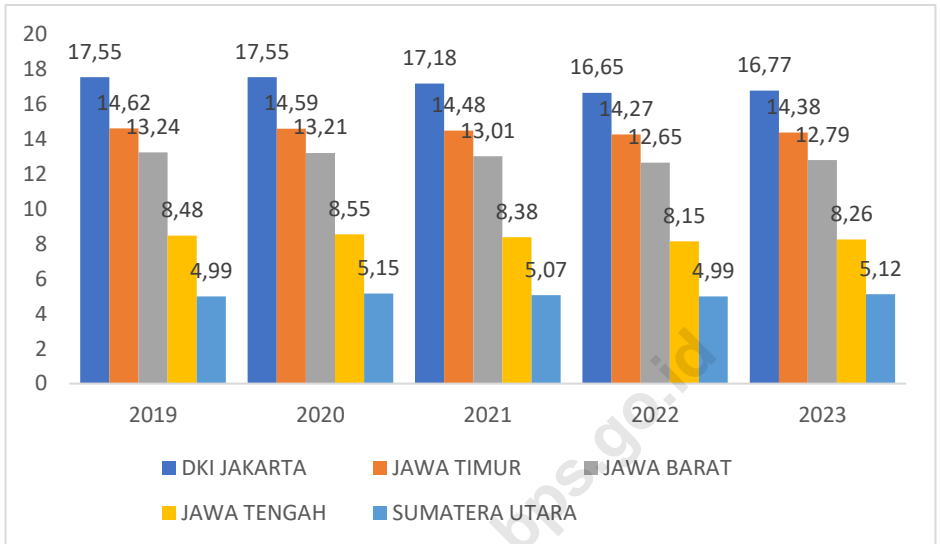
### 3.2. Posisi Ekonomi Jawa Tengah di Indonesia

Jawa Tengah merupakan provinsi yang sangat potensial dengan karakteristik ekonomi yang berpotensi menumbuhkan perekonomian nasional. Pertama,

provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia ini berpotensi menarik investor. Kedua, Jawa Tengah mempunyai kontribusi ekonomi nasional keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kontribusi ekonomi Jawa Tengah terhadap nasional sebesar 8,26% pada tahun 2023.

Pencapaian pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun terakhir sebelum pandemi telah memberi hasil positif pada level nasional. Sektor-sektor unggulan yang menyumbang pembangunan nasional adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Sebagai provinsi penyumbang ekonomi terbesar keempat di Indonesia, Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah RI bahkan mengeluarkan Perpres No.79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan yang ada di Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 7%. Walaupun pembangunan sempat terhambat karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, tapi 2021 sampai dengan 2022 kembali tumbuh dan pada tahun 2023 terus tumbuh hingga pulih seperti sebelum pandemi Covid-19.



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

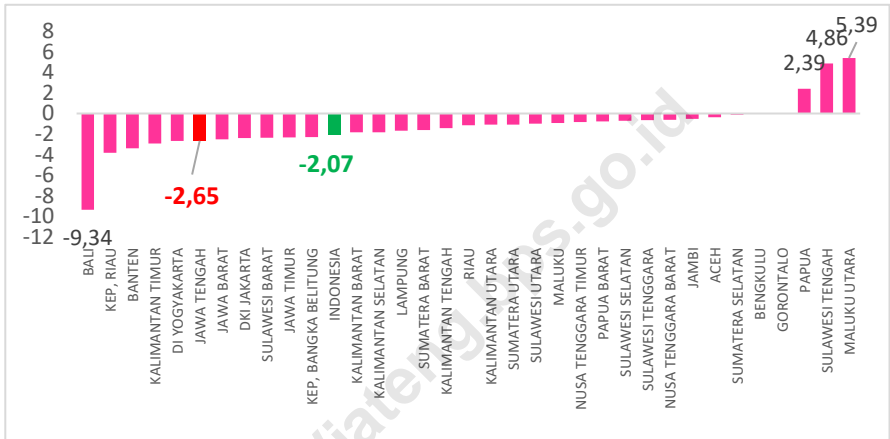
**Grafik 3.1. Kontribusi Ekonomi Lima Terbesar Provinsi di Indonesia 2019–2023**

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi tinggi menandakan ada pergerakan pembangunan pada wilayah tersebut.

Perekonomian suatu wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Dalam peningkatan faktor produksi ini yang kemudian disebut pertumbuhan ekonomi. Jawa Tengah dalam periode 2014-2019 mempunyai pertumbuhan ekonomi diatas 4% dan kinerja ekonomi di atas kinerja ekonomi nasional.

Tahun 2020 merupakan tahun pandemi pada hampir semua negara. Penularan kasus Covid-19 yang berdampak kematian membuat semua orang seakan berhenti beraktivitas diluar seperti biasa. Semua pergerakan dibatasi sehingga

berdampak pada hancurnya perekonomian. Indonesia juga mengalami hal sama. Hampir semua provinsi di Indonesia kinerja ekonominya terkontraksi kecuali Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua.



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

### Grafik 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia 2020

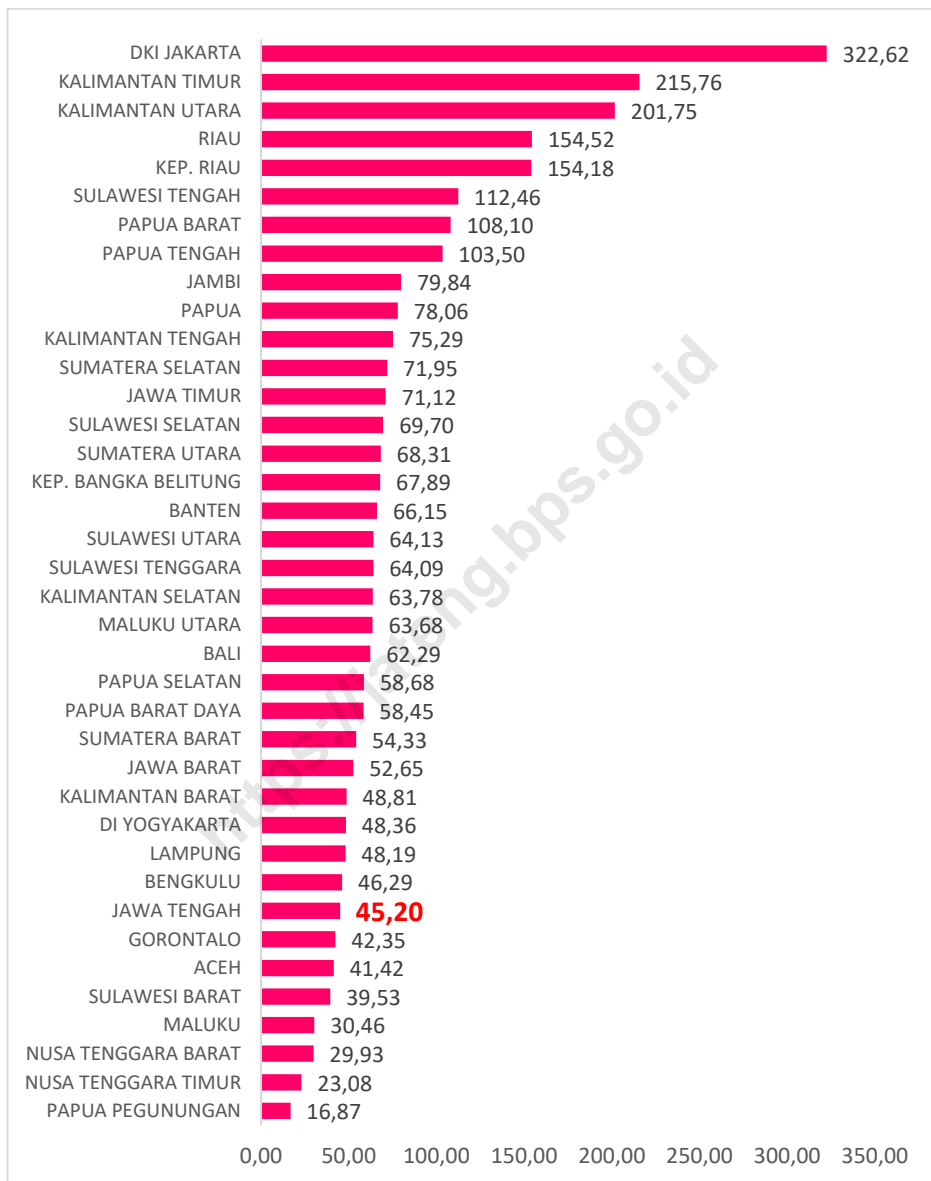
Tahun 2021 merupakan masa kebangkitan ekonomi setelah mengalami pandemi selama satu tahun. Pengalaman menghadapi pandemi tahun 2020, membuat kebijakan semakin mengarah ke perbaikan ekonomi dengan melakukan PPKM level wilayah dan tidak lagi menerapkan PSBB seperti tahun 2020. Hal ini membuat perekonomian mulai menggeliat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 3,33%. Kecuali provinsi Bali dan Papua Barat yang masih terkontraksi -2,46% dan -0,51%. Provinsi Bali yang ekonominya ditopang oleh pariwisata masih merasakan dampak pandemi, karena luar negeri masih memberlakukan pelarangan bepergian ke luar wilayah. Sedangkan Provinsi Papua Barat, penopang perekonomian industri pengolahan mengalami kontraksi.

Pada tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi masih terus digencarkan di Jawa Tengah melalui berbagai program sebagai bentuk besarnya dukungan terhadap UMKM dan gencarnya promosi pangan lokal. Sehingga, ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2022 mampu tumbuh sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 5,31%. Tidak hanya Provinsi Jawa Tengah, seluruh provinsi pada tahun 2022 juga sudah merasakan pertumbuhan ekonomi yang menggeliat.

Meskipun tahun 2023, perekonomian telah kembali pulih pada kondisi normal seperti sebelum pandemi Covid-19. Akan tetapi, dikarenakan ada krisis ekonomi global mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 melambat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 sebesar 5,05%, melambat 0,26 poin dari tahun 2022 yang sebesar 5,31%. Demikian pula di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 4,98%, melambat 0,33 poin dari tahun 2022.

Selain pertumbuhan ekonomi sebagai pengukur keberhasilan pembangunan, PDRB per kapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui total PDRB suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Semakin tinggi tingkat PDRB per kapita di suatu wilayah maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Jawa Tengah mempunyai pendapatan per kapita sebesar Rp 45,20 juta. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai Rp 7496 juta. Untuk peringkat antar provinsi, PDRB per kapita Jawa Tengah berada pada posisi 31 dari 38 provinsi di Indonesia.



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

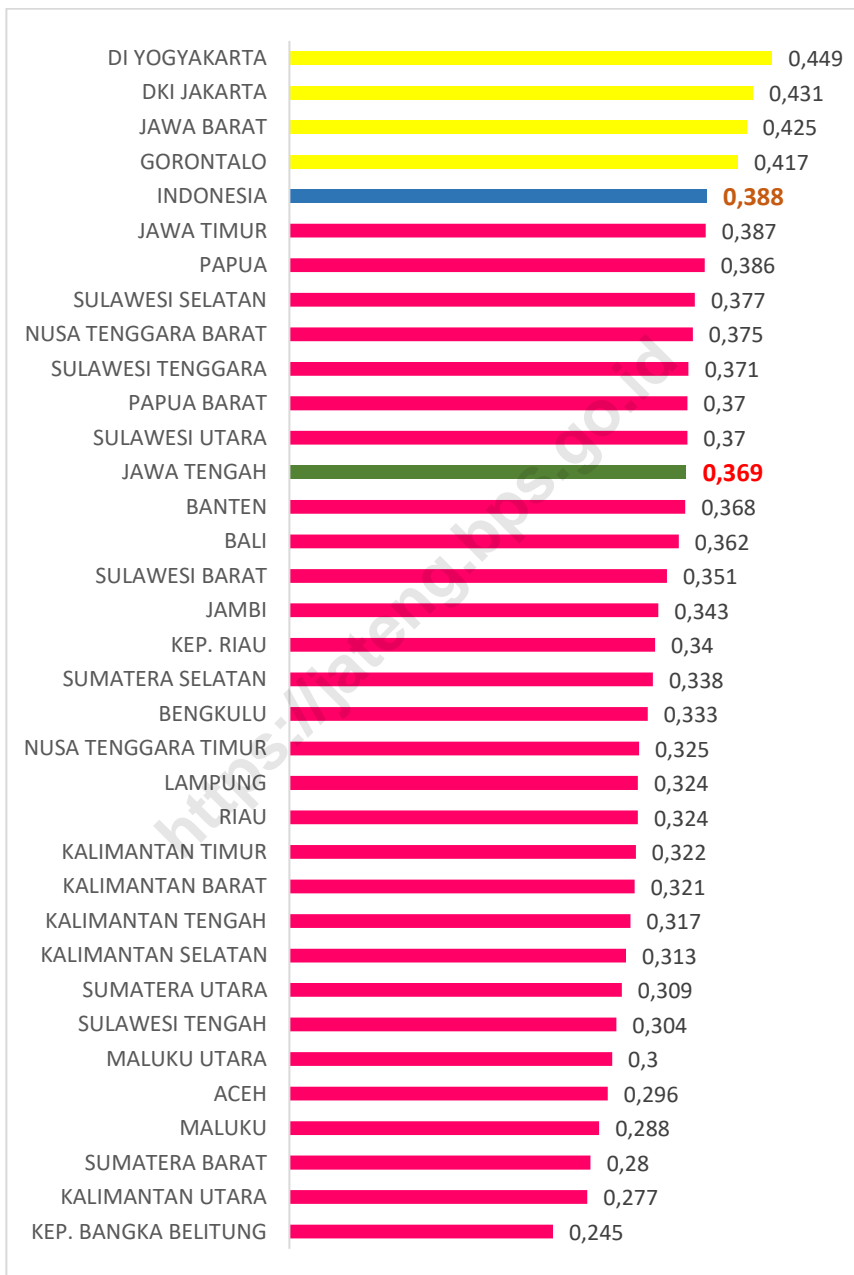
**Grafik 3.3. PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Indonesia 2023**



Nominal PDRB per kapita ini belum bisa menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil. Disparitas PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi yang mempunyai PDRB per kapita tertinggi di Indonesia cukup jauh. Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi di Indonesia sebesar 322,62 juta/penduduk. Demikian juga dengan provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah yang mempunyai PDRB per kapita di atas 100 juta/penduduk.

PDRB per kapita yang masih kurang dalam menggambarkan pendapatan riil, Gini Rasio merupakan alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Provinsi DI Yogyakarta mempunyai indeks gini rasio tertinggi se-Indonesia sebesar 0,449. Terdapat empat provinsi dengan tingkat gini rasio dalam kategori “sedang” selain DI Yogyakarta, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi dengan Gini Rasio terendah berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Gini Rasio 0,245.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, posisi Gini Rasio Jawa Tengah berada pada peringkat 23 dari 34 provinsi. Ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Tengah masih pada kategori rendah. Posisi Indeks Gini Rasio Jawa Tengah masih lebih rendah daripada Indonesia. Ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Tengah masih lebih baik daripada Indonesia. Gini Rasio Jawa Tengah sebesar 0,369 pada tahun 2023 masih dalam kategori tingkat ketimpangan “rendah”.



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (Maret 2023)

**Grafik 3.4. Gini Rasio Menurut Provinsi di Indonesia 2023**

<https://jateng.bps.go.id>

## BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN JAWA TENGAH

Ketimpangan adalah tema yang menarik perhatian dan menjadi isu terkini. Ketimpangan sebagai penanda adanya permasalahan, dan kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sebuah wilayah.

Kategori ketimpangan ada dua yaitu: *pertama*, ketimpangan hasil (ketimpangan pendapatan). Kedua, ketimpangan ketidaksetaraan kesempatan (ketimpangan wilayah karena proses dari pembangunan sumber daya alam dan infrastruktur).

Ketimpangan pendapatan dapat diukur melalui, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia. Sedangkan ketimpangan kesempatan dapat diukur dengan Pendapatan per kapita dan Indeks Williamson yang mencerminkan kondisi kesenjangan wilayah.

### 4.1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah antara pendapatan masyarakat yang satu dengan yang lainnya terjadi *gap*. Jika *gap* ini semakin tinggi yang terjadi adalah tidak kondusifnya suatu wilayah karena ada jurang yang sangat dalam memisahkan si miskin dan si kaya.

Studi yang dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan stabilitas makroekonomi (IMF, 2015). Selain itu, IMF juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan memicu terjadinya konflik. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi dan juga berdampak

negatif terhadap investasi pembangunan. Lebih lanjut, dengan adanya ketimpangan maka pemerintah dalam menghadapi guncangan ekonomi juga menjadi semakin sulit karena masyarakat yang relatif heterogen.

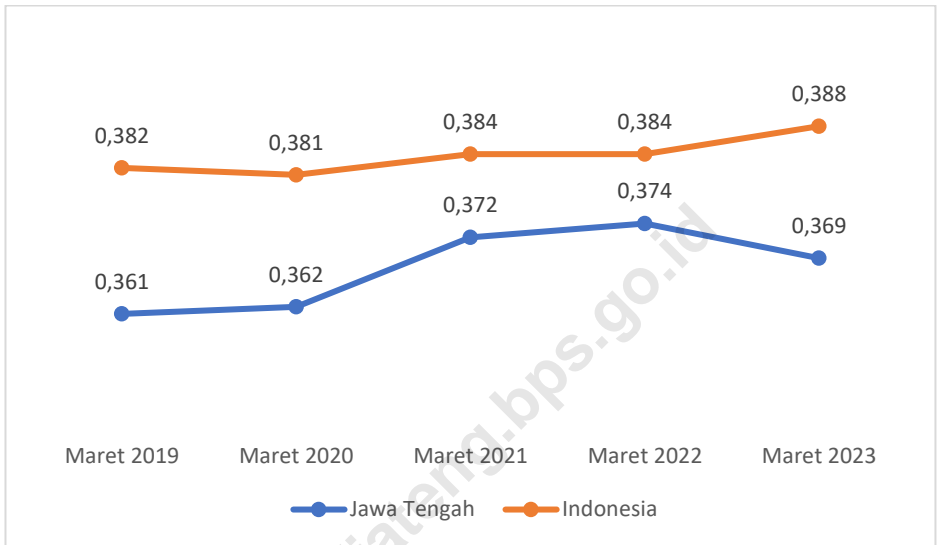
#### **4.1.1. Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah**

Selama periode 2019–2023, angka gini rasio untuk Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Posisi gini rasio Jawa Tengah berada pada kategori ketimpangan rendah. Walaupun dalam perjalanannya menunjukkan pola yang berfluktuasi.

Pada tahun 2019, angka gini rasio Jawa Tengah tercatat sebesar 0,361. Sementara dalam tahun yang sama angka gini rasio Indonesia tercatat sebesar 0,382. Selanjutnya pada tahun 2019, angka gini rasio baik Jawa Tengah maupun Indonesia mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 0,361 dan 0,382. Setahun kemudian, angka gini rasio Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,001 poin sehingga menjadi 0,362. Sebaliknya pada skala nasional, angka gini rasio Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,001 poin sehingga menjadi 0,381. Pada tahun 2021, angka gini rasio Jawa Tengah dan Indonesia mengalami peningkatan dengan nilai masing-masing 0,372 dan 0,384. Setahun berikutnya, angka gini rasio Jawa tengah meningkat menjadi 0,374. Sedangkan pada level nasional stagnan pada angka 0,384.

Angka gini rasio Jawa Tengah yang fluktuatif menunjukkan masih tingginya tingkat ketimpangan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, terdapat ketimpangan tingkat pengeluaran antara kelompok masyarakat atas dengan kelompok masyarakat bawah. Selain itu, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa

hasil pembangunan masih belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat di Jawa Tengah.

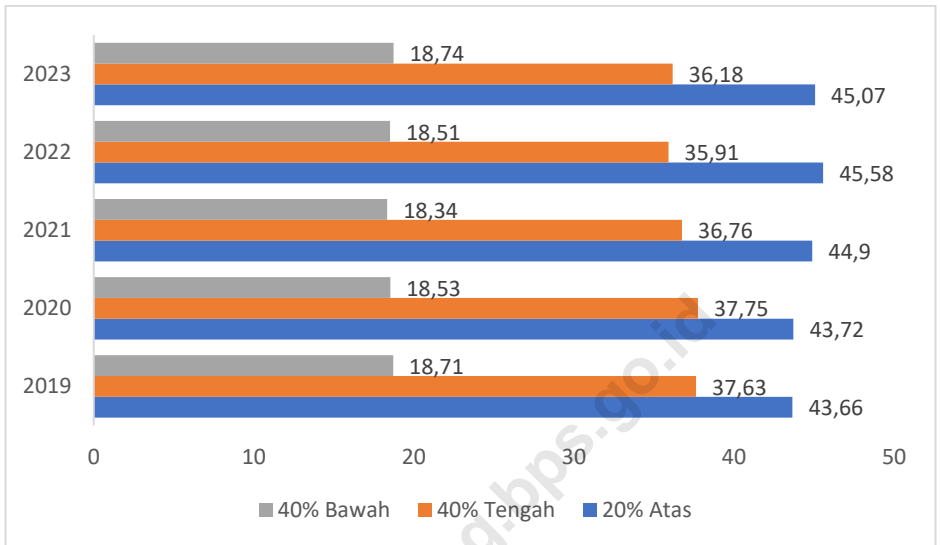


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

**Grafik 4.1. Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah dan Indonesia, Maret 2019 – Maret 2023**

#### 4.1.2. Kriteria Bank Dunia

Untuk mengukur ketimpangan penduduk, Bank Dunia menggunakan indikator yang didasarkan pada distribusi pendapatan penduduk menurut kelompok pendapatan. Menurut ukuran tersebut, tingkat ketimpangan termasuk tinggi jika 40% kelompok terendah mempunyai total pendapatan kurang dari 12% dari seluruh pendapatan. Jika proporsi pendapatan dari 40% kelompok terendah sebanyak 12%-17%, maka termasuk ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Adapun ketimpangan dianggap rendah jika 40% kelompok terendah mempunyai total pendapatan lebih dari 17% dari total pendapatan.



Sumber : [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id)

#### Grafik 4.2. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah di Jawa Tengah, 2019–2023

Tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2023 jika diukur dengan menggunakan kriteria Bank Dunia termasuk ke dalam kategori ketimpangan rendah yaitu sebesar 18,74%. Hal ini berarti bahwa kue pembangunan tersebut dinikmati masyarakat 40% golongan berpendapatan rendah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, proporsi total pendapatan meningkat. Dimana pada tahun 2022 hanya sebesar 18,51%. Walaupun demikian, kondisi kesenjangan ini masih sedikit berada di atas ambang batas kategori.

Hal lain yang dapat diamati dari hasil perhitungan kriteria Bank Dunia tersebut adalah kontribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 20% penduduk berpenghasilan teratas melebihi dua kali lipat dari 40% penduduk dengan

penghasilan terendah. Grafik 4.2. menunjukkan dominasi kelompok penduduk 20% pengeluaran teratas masih sangat tinggi selama lima tahun terakhir.

Penerimaan golongan ini dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari yang awalnya menguasai 43,72% di tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 44,9% di tahun 2021. Akan tetapi, di tahun 2022 dan 2023 persentasenya menurun menjadi 45,58% di tahun 2022 dan 45,07% di tahun 2023 dari total pengeluaran masyarakat Jawa Tengah.

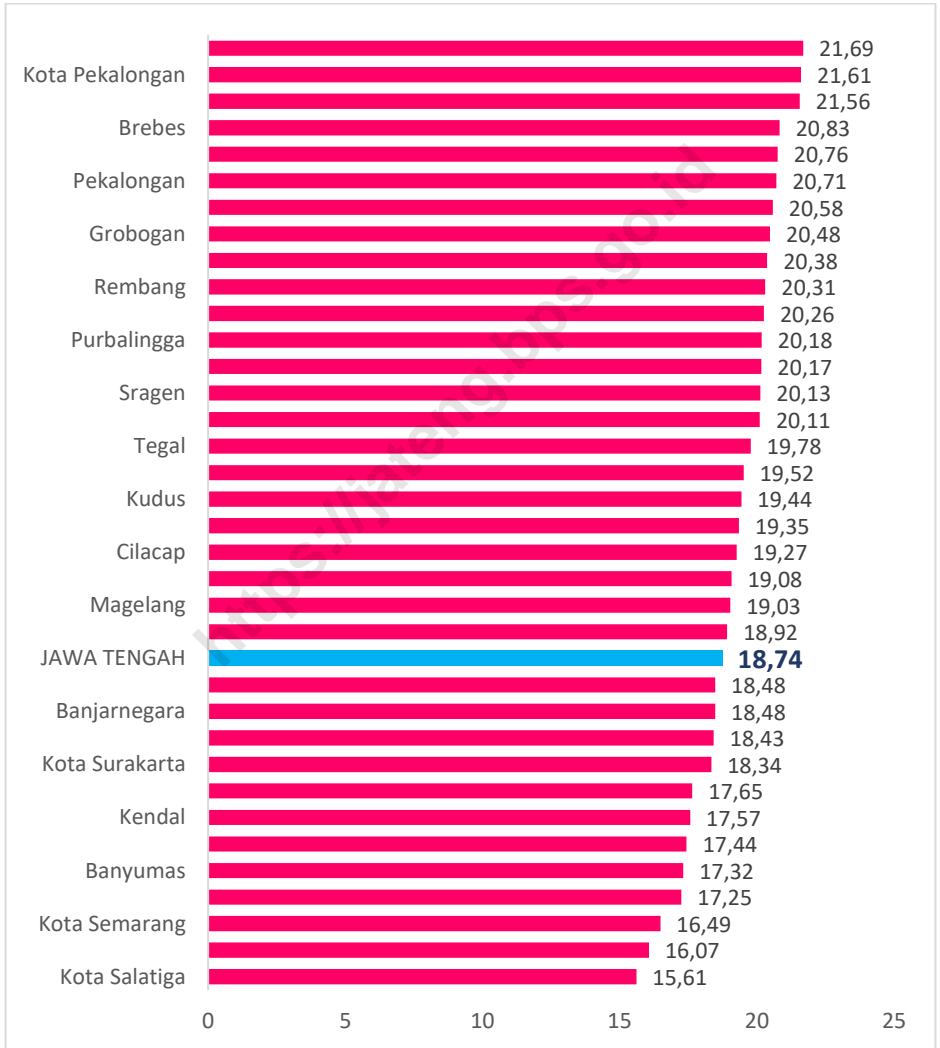
Meski tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun terlihat pula adanya kecenderungan peningkatan persentase pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah, khususnya dalam satu tahun terakhir. Selain itu, terlihat pula penurunan persentase pengeluaran dari kelompok penduduk 40% menengah. Hal tersebut mengindikasikan semakin membaiknya tingkat ketimpangan di Jawa Tengah.

Jika diamati dari grafik 4.3. terdapat 4 kota di Jawa Tengah berada di posisi ketimpangan sedang. Karena *gap* lapisan penduduk di perkotaan lebih beragam dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Ekonomi di kabupaten cenderung merata dengan ekonomi kerakyatan sehingga hasil pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Ada 1 kota di Jawa Tengah yang ketimpangannya rendah. Kota tersebut adalah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan yang letaknya berada di pantura jika diamati sebagian besar ekonominya ditopang oleh industri pengolahan yang didominasi oleh usaha rumah tangga.



Kabupaten Blora mempunyai ketimpangan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah dengan 40% penduduk golongan pengeluaran terendah menikmati 20,11% dari total pengeluaran.



Sumber : [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id)

**Grafik 4.3. Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2022**

Sedangkan ketimpangan sedang ada di Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Semarang dengan nilai masing-masing 15,61%, 16,07%, dan 16,49. Selain keempat kota tersebut di Jawa Tengah, seluruhnya masuk dalam kriteria ketimpangan rendah.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah fluktuasi yang terjadi baik pada angka gini rasio maupun ukuran Bank Dunia. Masih berfluktuasinya angka gini rasio dan persentase pengeluaran penduduk menurut kelompok pengeluaran menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan mempunyai potensi yang besar untuk meningkat. Diperlukan program dan kebijakan yang lebih strategis agar ketimpangan dapat diturunkan secara lebih konsisten.

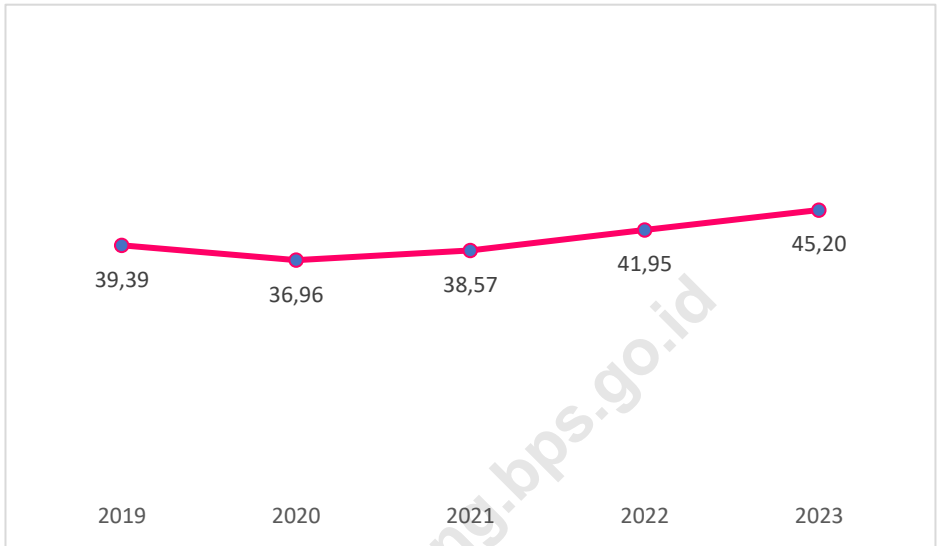
## **4.2. Ketimpangan Wilayah**

Salah satu permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan di Indonesia diantaranya adalah permasalahan mengenai ketimpangan wilayah atau kesenjangan pembangunan antar wilayah. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat namun di beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Salah satu provinsi yang juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan wilayah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Ketimpangan wilayah ini dapat diukur dengan pendapatan per kapita dan Indeks Williamson.

### **4.2.1. Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Tengah**

Walaupun pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan yang disebabkan pandemi Covid-19, PDRB per kapita Jawa Tengah telah naik tajam selama satu dekade terakhir.



Sumber : [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id)

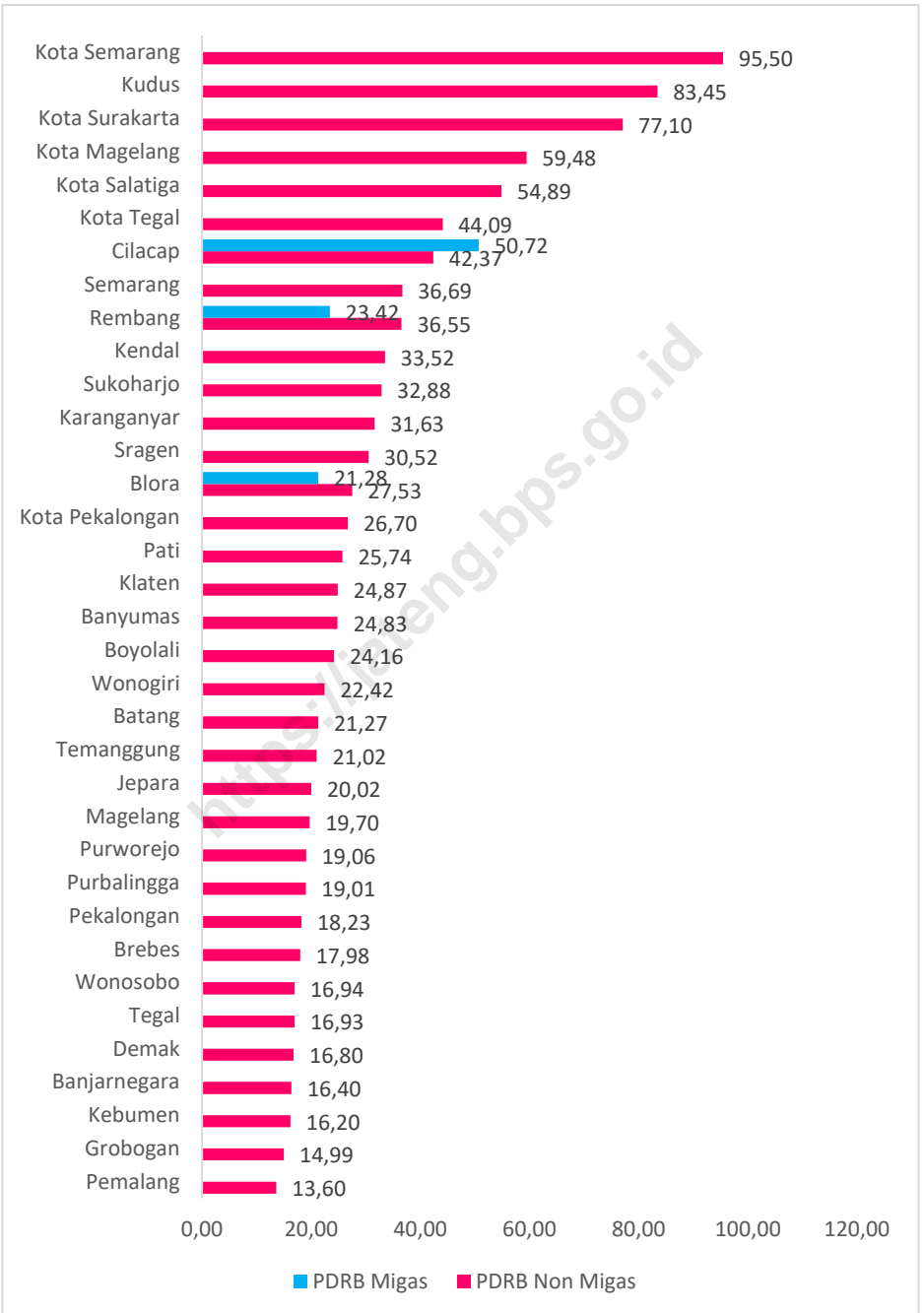
**Grafik 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Tengah (Juta Rupiah),  
2019–2023**

Pada gambar 4.4. dengan menggunakan PDRB per kapita harga berlaku Provinsi Jawa Tengah, dimana pada pada tahun 2019 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 36,39 juta merupakan angka PDRB per kapita terendah dan pada tahun 2023 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 45,20 juta merupakan angka PDRB per kapita tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa angka PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 PDRB per kapita turun menjadi Rp 36,96 juta karena terjadi pandemi.

Namun demikian peningkatan PDRB per kapita ini tidak bisa langsung dianalisis sebagai peningkatan kesejahteraan. Perlu dilihat pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

#### 4.2.2. Analisis PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota

<https://jateng.bps.go.id>



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

#### **Grafik 4.5. PDRB Per Kapita Jawa Tengah (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota, 2023**

Grafik 4.5 adalah gambaran pendapatan per kapita antar wilayah di Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan nilai pendapatan per kapita antar wilayah di Jawa Tengah.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, tingkat kesejahteraan yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang sebesar Rp 95,50 juta dan Kabupaten Kudus sebesar Rp 83,45 juta. Kota Semarang menonjol pada industri pengolahan dengan kontribusi industrinya mencapai 28,78% terhadap total PDRB Kota Semarang. Sedangkan sumbangan industri pengolahan Kota Semarang terhadap total industri pengolahan di Jawa Tengah tertinggi dengan kontribusi sebesar 12,44%.

Kalau dilihat dari letak geografisnya daerah-daerah yang mengelilingi Kota Semarang mempunyai PDRB per kapita yang rendah walaupun sumber daya alam di daerah-daerah tersebut tidak banyak berbeda. Seperti halnya Kota Semarang yang secara geografis dikelilingi oleh Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Dari ketiga kabupaten, Kabupaten Demak memiliki PDRB per kapita terendah, sedangkan dua kabupaten lainnya memiliki PDRB per kapita yang cukup tinggi dan angka kontribusi yang mirip terhadap PDB Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sehingga perekonomiannya sangat maju dan menjadi tempat berkembangnya industri pengolahan, sektor jasa dan juga tempat wisata. Kalau dilihat dari letak geografisnya beberapa kota yang menjadi satelit seperti kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal PDRB per kapita cukup tinggi

walaupun masih kalah dibandingkan dengan Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.

Grafik 4.5. menunjukkan bahwa masih ada jarak yang cukup jauh antara PDRB per kapita tertinggi yang diduduki oleh Kota Semarang dengan nilai sebesar Rp 95,50 juta dibandingkan PDRB per kapita Kabupaten Pemalang merupakan PDRB yang terendah, yaitu sebesar Rp 13,60 juta. Perbedaan akan sumber daya alam dan juga infrastruktur memang sangat mempengaruhi pendapatan setiap daerah di Jawa Tengah. Dilihat dari ketimpangan PDRB per kapita dari yang tertinggi hingga terendah sangat jauh perbedaannya mencapai 91,90 juta dan ini masih jauh dari rata-rata PDRB per kapita provinsi yang sebesar 45,20 juta rupiah.

Dengan ketimpangan PDRB per kapita cukup jauh maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Jika proporsi pengeluaran 40% masyarakat golongan bawah kecil, maka ketimpangan pembangunan cukup tinggi.

### **4.3. Analisis Indeks Williamson**

Perbedaan sumber daya alam, keterampilan tenaga kerja, teknologi, dan akumulasi modal lainnya yang dimiliki oleh suatu wilayah telah mengakibatkan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi, heterogenitas karakteristik wilayah juga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Analisis tingkat ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar, alasannya karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah.

Data yang diperlukan untuk mengukur Indeks Williamson adalah dengan PDRB per kapita untuk setiap kabupaten/kota dan jumlah penduduk tiap kabupaten/kota. Bila indeks mendekati 0 (nol) artinya sangat merata, sedangkan semakin jauh dari 0 (nol) artinya sangat timpang.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah kebijakan pembangunan di provinsi Jawa tengah selama 2019-2023 dianalisis menggunakan Indeks Williamson dan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan semakin melebar atau semakin merata dapat dilihat pada grafik 4.6.

Upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan telah berhasil pada tahun 2022-2023 yang mencapai 0,6325 dari sebelumnya 0,6525 pada tahun 2022. Namun, ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong ketidakmerataan pembangunan tinggi karena angka indeksnya diatas 0,5.

**Tabel 4.1. Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 2019–2023**

Tahun	Indeks Williamson
2019	0,6186
2020	0,6564
2021	0,6549
2022	0,6525
2023	0,6325
<b>Rata-rata</b>	<b>0,6430</b>

Sumber : BPS data diolah

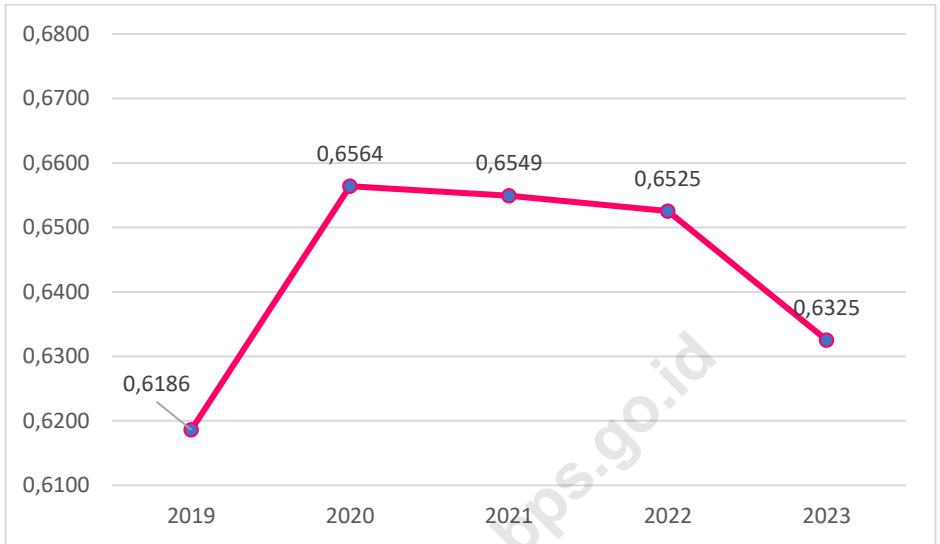
Rata-rata indeks Williamson PDRB non migas selama tahun 2019–2023 berkisar pada nilai 0,6430. Indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun



2020 sebesar 0,6564 dan yang terendah pada tahun 2019 sebesar 0,6186. Indeks Williamson PDRB non migas juga masih tergolong ketidakmerataan tinggi.

Ketimpangan ini terjadi karena masing-masing kabupaten/kota memiliki sumber daya alam dan infrastruktur yang berbeda-beda dimana hal tersebut menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah yang memilikinya. Seperti Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan kemajuan perekonomiannya, serta menjadi tempat berkembangnya industri pengolahan, sektor jasa, dan juga tempat wisata. Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas seperti pelabuhan antar pulau dan bandara, sehingga menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah.

Disisi lain Kabupaten Pemalang mempunyai PDRB per kapita terendah. Sektor yang berkontribusi menopang perekonomiannya adalah pertanian. Ini merupakan tantangan dan perlu usaha keras pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif bagi penanaman modal di dalam maupun modal asing untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan lebih menggali lagi potensi pertanian yang bisa menjadi produk unggulan dari Kabupaten Pemalang sehingga bisa menambah nilai tambah bruto wilayah tersebut. Dengan bertambahnya nilai tambah bruto diharapkan akan mampu menekan ketimpangan di Jawa Tengah.



Sumber : BPS data diolah

#### **Grafik 4.6. Indeks Williamsons PDRB di Provinsi Jawa Tengah 2019–2023**

Faktor perencanaan dan manajemen pembangunan yang baik akan menyebabkan kawasan menjadi kawasan ekonomi yang strategis. Merujuk pada peta wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki menyebabkan ketimpangan-ketimpangan di sektor-sektor tertentu. Ketimpangan tersebut mengakibatkan arus urbanisasi meningkat, ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan SDM, ketidakmerataan penggunaan teknologi, dan aksesibilitas yang kurang memadai.

Pada tahun 2023, Indeks Williamsons mengalami penurunan dengan besaran 0,6325 atau turun 0,02 poin. Jawa Tengah masih dalam keadaan pemulihan pasca pandemi tahun 2020.

Jika diamati dari grafik 4.6. disparitas indeks Williamson non migas semakin mengecil dari 2020–2023. Ini menandakan penciptaan ekonomi riil Jawa Tengah semakin meningkat. Ini suatu pertanda yang baik, karena kinerja ekonomi riil lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Permasalahan yang masih menjadi PR pemerintah adalah menekan ketimpangan pembangunan. Sehingga pembangunan riil ini lebih bisa dinikmati oleh semua wilayah di Jawa Tengah.

<https://jateng.bps.go.id>

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketimpangan merupakan penanda adanya permasalahan, sedangkan kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sebuah wilayah.
2. Kategori ketimpangan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
  - Ketimpangan hasil yaitu ketimpangan pendapatan/pengeluaran
  - Ketimpangan kesempatan yaitu ketimpangan wilayah karena tidak meratanya infrastruktur dan sumber daya alam
3. Provinsi Jawa Tengah mempunyai kontribusi ekonomi keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.
4. Kontribusi Jawa Tengah terhadap ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 8,26%.
5. PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat 31 nasional dan dibawah rata-rata PDRB per kapita Indonesia.
6. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 2014–2019 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan tahun 2020, kinerja ekonomi Provinsi Jawa Tengah berkontraksi -2,65%. Tahun 2021 kembali bangkit dengan tumbuh sebesar 3,33% dan terus tumbuh

pada tahun 2022 hingga menyamai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Lalu pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah melambat 4,98%.

7. Gini Rasio Jawa Tengah sebesar 0,369 tahun 2023 masih dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Tengah cukup merata.
8. Tahun 2019 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 39,39 juta, lalu pada tahun 2020 turun menjadi Rp 36,69 juta, angka ini terendah sepanjang tahun 2019–2023 walaupun kemudian meningkat pada tahun 2021 hingga Rp 38,57 juta. Hal ini menunjukkan bahwa angka PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setelah tahun 2020 dimana terjadi pandemi. Kemudian terus meningkat menjadi Rp 45,20 juta pada tahun 2023.
9. PDRB per kapita tertinggi Jawa Tengah adalah Kota Semarang sebesar Rp 95,50 juta dan terendah Kabupaten Pemalang sebesar Rp 13,60 juta.
10. Distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Semarang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Sedangkan kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori ketimpangan rendah.
11. Berdasarkan nilai Indeks Williamson, ketidakmerataan di Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Namun, ketimpangan menurun pada tahun 2019. Walaupun ketimpangan naik pada tahun 2020 karena pandemi, yaitu sebesar 0,657, ketimpangan turun lagi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 menjadi sebesar 0,632 pada tahun 2023.

## 5.2. Saran

1. Kebijakan pembangunan seyogyanya memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat. Bagi kabupaten/kota yang masuk dalam daerah maju adalah dengan memberikan bantuan bagi daerah tertinggal berupa pembiayaan program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (menciptakan *humancapital*), karena peningkatan kualitas sumber daya manusia ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan melalui peningkatan penyerapan ide dan inovasi teknologi kewirausahaan. Kebanyakan kabupaten/kota yang sudah maju dan berkembang cepat mengandalkan sektor industri dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga *sharing skill* ke daerah tertinggal dengan menularkan keterampilan yang dimiliki.
2. Konsolidasi antar daerah atau kabupaten/kota dengan pemerintahan provinsi dengan membuat perencanaan pembangunan terstruktur untuk meminimalisir ketimpangan.
3. Membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.
4. Pengembangan sektor potensi pada daerah tertinggal dan memasarkan produk-produknya ke keluar daerah.

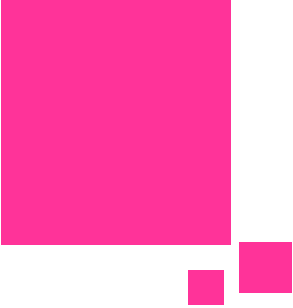
<https://jateng.bps.go.id>

## Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 17, I, 2002, 27-45
- BPS Jawa Tengah. 2022. Beberapa Indikator Sosial Ekonomi BPS Provinsi Jawa Tengah Edisi September 2022. Semarang
- BPS Jawa Tengah. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2018-2022. Semarang
- Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta

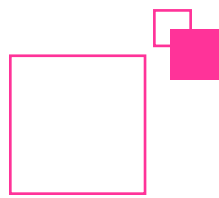


<https://jateng.bps.go.id>



# Lampiran

<https://jateng.bps.go.id>



<https://jateng.bps.go.id>

**Tabel 1. PDRB Per Kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2019–2023 (Ribu Rp)**

38 Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah)				
	Harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	30.879,06	31.633,38	34.673,56	38.900,18	41.424,37
SUMATERA UTARA	54.620,40	54.979,04	57.441,93	62.922,26	68.305,71
SUMATERA BARAT	44.885,51	43.825,66	45.218,16	50.264,02	54.326,76
RIAU	111.227,01	114.166,90	129.740,71	151.258,97	154.522,28
JAMBI	60.828,86	57.957,73	64.770,93	76.164,32	79.835,78
SUMATERA SELATAN	53.359,10	53.842,74	57.744,67	68.237,45	71.950,37
BENGKULU	36.565,29	36.552,50	39.167,13	43.756,98	46.285,28
LAMPUNG	42.172,32	39.290,33	40.806,71	44.983,67	48.194,22
KEP. BANGKA BELITUNG	52.232,80	52.023,40	58.406,07	63.871,65	67.885,26
KEP. RIAU	119.394,66	123.464,79	131.883,84	145.579,01	154.178,97
DKI JAKARTA	268.052,25	262.615,17	274.659,62	299.674,52	322.615,13
JAWA BARAT	43.309,19	43.236,51	45.234,18	49.136,90	52.651,45
JAWA TENGAH	39.388,15	36.964,78	38.568,08	41.946,05	45.198,51
DI YOGYAKARTA	36.459,73	37.693,64	40.516,00	44.637,15	48.358,22
JAWA TIMUR	59.015,17	56.640,82	59.988,44	66.246,91	71.121,93
BANTEN	52.013,99	52.729,40	55.383,29	61.413,76	66.147,39
BALI	57.755,96	52.015,45	50.758,32	56.091,82	62.293,23
NUSA TENGGARA BARAT	25.716,11	25.183,56	26.009,17	28.670,72	29.925,60
NUSA TENGGARA TIMUR	19.630,02	20.056,99	20.554,99	21.656,83	23.078,03
KALIMANTAN BARAT	42.045,41	39.622,24	42.252,66	46.092,06	48.808,92
KALIMANTAN TENGAH	56.625,38	57.145,08	62.833,77	72.988,52	75.293,97
KALIMANTAN SELATAN	42.823,56	44.100,79	48.065,95	60.244,41	63.779,06
KALIMANTAN TIMUR	180.259,10	161.798,85	183.157,52	238.916,99	215.761,42
KALIMANTAN UTARA	138.751,01	143.533,29	157.091,68	192.588,32	201.748,78
SULAWESI UTARA	53.173,03	50.531,13	51.031,13	50.033,57	51.133,06

38 Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah)				
	Harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
SULAWESI TENGAH	61.056,03	66.306,27	82.016,81	106.068,47	112.461,06
SULAWESI SELATAN	57.182,14	55.675,03	59.502,64	65.350,37	69.702,40
SULAWESI TENGGARA	48.514,15	49.718,15	52.436,02	58.714,73	64.088,40
GORONTALO	34.976,65	35.693,26	37.086,76	39.693,74	42.346,82
SULAWESI BARAT	34.111,83	32.836,75	35.195,14	37.068,10	39.533,27
MALUKU	26.097,04	25.094,36	26.153,05	28.525,64	30.456,11
MALUKU UTARA	32.124,96	33.069,32	40.381,06	53.776,27	63.676,84
PAPUA BARAT	87.542,37	73.932,60	74.021,65	78.132,75	108.101,50
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	58.450,13
PAPUA	56.618,95	46.416,36	54.050,61	59.383,62	78.061,39
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	58.680,24
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	103.503,90
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	16.869,97
INDONESIA	59.317,91	57.289,59	62.259,07	71.043,44	74.964,70

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi di Indonesia, 2019–2023**

38 Provinsi	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	3,45	0,71	1,35	2,78	2,83
SUMATERA UTARA	3,61	-1,84	1,12	3,28	3,6
SUMATERA BARAT	3,14	-2,33	1,85	2,88	3,18
RIAU	2,51	6,03	1,87	3,13	2,84
JAMBI	4,46	0,27	2,32	3,77	3,35
SUMATERA SELATAN	4,11	0,53	2,3	4,02	3,92
BENGKULU	4,49	-1,7	1,9	2,94	2,93
LAMPUNG	4,18	-7,43	1,51	3,04	3,34
KEP. BANGKA BELITUNG	3,95	-2,33	3,62	2,99	3,01
KEP. RIAU	-0,08	4,77	1,85	3,53	3,67
DKI JAKARTA	5,46	-2,7	2,89	4,91	4,65
JAWA BARAT	4,3	-0,77	2,5	4,24	3,83
JAWA TENGAH	5,17	-7,71	2,3	4,26	3,97
DI YOGYAKARTA	4,78	2,76	4,91	4,45	4,4
JAWA TIMUR	4,88	-4,4	2,76	4,55	4,19
BANTEN	5,06	3,48	3,16	3,78	3,61
BALI	3,9	-8,26	-3,19	4,1	4,99
NUSA TENGGARA BARAT	1,1	-3,49	0,75	5,26	0,21
NUSA TENGGARA TIMUR	3,98	1,56	0,89	1,41	1,9
KALIMANTAN BARAT	4,17	-8,26	3,37	3,65	3,09
KALIMANTAN TENGAH	6,53	-1,91	2,17	5,01	2,77
KALIMANTAN SELATAN	3,26	1,9	2,12	3,76	3,55

38 Provinsi	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
KALIMANTAN TIMUR	5,54	-6,43	1,28	3,04	4,78
KALIMANTAN UTARA	10,09	-1,67	2,48	3,84	3,51
SULAWESI UTARA	5,24	-5,65	3,28	4,58	4,66
SULAWESI TENGAH	7,7	7,13	10,29	13,86	10,62
SULAWESI SELATAN	6,33	-3,28	3,46	3,92	3,37
SULAWESI TENGGARA	6,1	1,13	2,41	3,79	3,65
GORONTALO	7,23	0,6	1,15	2,75	3,23
SULAWESI BARAT	5,27	-6,2	1,02	0,75	3,68
MALUKU	5,72	-4,95	2,19	3,89	3,81
MALUKU UTARA	5,99	1,81	14,95	21,18	18,81
PAPUA BARAT	-0,13	-15,42	-2,14	0,34	3,47
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	0,24
PAPUA	-16,36	-20,13	13,43	7,39	2,83
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	2,76
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	4,42
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	3,37
INDONESIA	4,27	-3,03	2,52	4,15	3,93

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Tabel 3. Gini Rasio menurut Provinsi di Indonesia, 2019–2023 (Maret)**

38 Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	0,319	0,323	0,324	0,311	0,296
SUMATERA UTARA	0,317	0,316	0,314	0,312	0,309
SUMATERA BARAT	0,306	0,305	0,306	0,3	0,28
RIAU	0,334	0,329	0,326	0,326	0,324
JAMBI	0,321	0,32	0,321	0,32	0,343
SUMATERA SELATAN	0,331	0,339	0,341	0,339	0,338
BENGKULU	0,34	0,334	0,326	0,315	0,333
LAMPUNG	0,329	0,327	0,323	0,314	0,324
KEP. BANGKA BELITUNG	0,269	0,262	0,256	0,236	0,245
KEP. RIAU	0,341	0,339	0,343	0,342	0,34
DKI JAKARTA	0,394	0,399	0,409	0,423	0,431
JAWA BARAT	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
JAWA TENGAH	0,361	0,362	0,372	0,374	0,369
DI YOGYAKARTA	0,423	0,434	0,441	0,439	0,449
JAWA TIMUR	0,37	0,366	0,374	0,371	0,387
BANTEN	0,365	0,363	0,365	0,363	0,368
BALI	0,366	0,369	0,378	0,363	0,362
NUSA TENGGARA BARAT	0,379	0,376	0,381	0,373	0,375
NUSA TENGGARA TIMUR	0,356	0,354	0,346	0,334	0,325
KALIMANTAN BARAT	0,327	0,317	0,313	0,314	0,321
KALIMANTAN TENGAH	0,336	0,329	0,323	0,319	0,317
KALIMANTAN SELATAN	0,334	0,332	0,33	0,317	0,313
KALIMANTAN TIMUR	0,33	0,328	0,334	0,327	0,322
KALIMANTAN UTARA	0,295	0,292	0,292	0,272	0,277
SULAWESI UTARA	0,367	0,37	0,365	0,365	0,37



38 Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
SULAWESI TENGAH	0,327	0,326	0,316	0,308	0,304
SULAWESI SELATAN	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377
SULAWESI TENGGARA	0,399	0,389	0,39	0,387	0,371
GORONTALO	0,407	0,408	0,408	0,418	0,417
SULAWESI BARAT	0,365	0,364	0,356	0,362	0,351
MALUKU	0,324	0,318	0,314	0,301	0,288
MALUKU UTARA	0,312	0,308	0,3	0,279	0,3
PAPUA BARAT	0,386	0,382	0,38	0,37	0,37
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-
PAPUA	0,394	0,392	0,397	0,406	0,386
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-
INDONESIA	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010, 2020, dan 2023**

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa)		
	2010	2020	2023
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	32.382.657	36.516.035	37.540.962
Kabupaten Cilacap	1.642.107	1.944.857	2.007.829
Kabupaten Banyumas	1.554.527	1.776.918	1.828.573
Kabupaten Purbalingga	848.952	998.561	1.027.333
Kabupaten Banjarnegara	868.913	1.017.767	1.047.226
Kabupaten Kebumen	1.159.926	1.350.438	1.397.555
Kabupaten Purworejo	695.427	769.880	788.265
Kabupaten Wonosobo	754.883	879.124	909.664
Kabupaten Magelang	1.181.723	1.299.859	1.330.656
Kabupaten Boyolali	930.531	1.062.713	1.090.129
Kabupaten Klaten	1.130.047	1.260.506	1.284.386
Kabupaten Sukoharjo	824.238	907.587	932.680
Kabupaten Wonogiri	928.904	1.043.177	1.051.085
Kabupaten Karanganyar	813.196	931.963	955.116
Kabupaten Sragen	858.266	976.951	997.485
Kabupaten Grobogan	1.308.696	1.453.526	1.492.891
Kabupaten Blora	829.728	884.333	901.621
Kabupaten Rembang	591.359	645.333	660.166
Kabupaten Pati	1.190.993	1.324.188	1.359.364
Kabupaten Kudus	777.437	849.184	874.632
Kabupaten Jepara	1.097.280	1.184.947	1.221.086
Kabupaten Demak	1.055.579	1.203.956	1.240.510
Kabupaten Semarang	930.727	1.053.094	1.080.648
Kabupaten Temanggung	708.546	790.174	808.446
Kabupaten Kendal	900.313	1.018.505	1.052.826
Kabupaten Batang	706.764	801.718	828.883

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa)		
	2010	2020	2023
Kabupaten Pekalongan	838.621	968.821	1.007.384
Kabupaten Pemalang	1.261.353	1.471.489	1.523.622
Kabupaten Tegal	1.394.839	1.596.996	1.654.836
Kabupaten Brebes	1.733.869	1.978.759	2.043.077
Kota Magelang	118.227	121.526	122.150
Kota Surakarta	499.337	522.364	526.870
Kota Salatiga	170.332	192.322	198.920
Kota Semarang	1.555.984	1.653.524	1.694.743
Kota Pekalongan	281.434	307.150	317.524
Kota Tegal	239.599	273.825	282.781

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

<https://jateng.bps.go.id>



**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

JL. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412804, 8412805, Fax 8311195

Homepage : <https://jateng.bps.go.id> E-mail : [jateng@bps.go.id](mailto:jateng@bps.go.id)